

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun

Defiana Ramadhani^{1*}, Halmawati²

^{1,2}, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Korespondensi: defianar@yahoo.com

Abstract

This study set out to find out how the use of government accounting standards, regional financial accounting systems, and expertise in human resources all affect the quality of regional financial reports. This study's participants were all 33 Regional Apparatus Organizations (OPD) in the Simalungun Regency. The samples taken in this study were 33 OPD in Simalungun Regency. Each sample each as many as 3 respondents. Respondents in this study were 1 Head of Finance Subdivision, 1 staff member of the finance section, and 1 treasurer at OPD. With a total sample of 99 people. By distributing questionnaires to the relevant respondents, data were gathered. Using SPSS 24, multiple linear regression was used to analyze the data. The findings indicate that the Accounting System for Regional Finance, Government Accounting Standards, and Human Resource Competence all significantly improve the quality of financial reports produced by regional governments. Additionally, the findings indicate that the Accounting System for Regional Finance significantly improves the quality of financial reports produced by regional governments.

Keywords: *application of government accounting standard; quality of regional financial reports; regional financial accounting systems; the effect of human resource competence.*

How to cite

Ramadhani, Defiana & Halmawati. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi pada OPD Kabupaten Simalungun. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 203-215. **DOI:** <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.16>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang situasi keuangan entitas pelapor dan semua transaksi selama periode pelaporan. Menurut Siswati et al., laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi entitas pelapor, menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan menentukan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam operasi pemerintah. (2022).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas,

dan catatan atas laporan keuangan, merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja. Laporan keuangan terkonsolidasi berdasarkan praktik terbaik internasional dikenal sebagai LKPD dalam pengelolaan keuangan suatu negara. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 2004, LKPD diterbitkan setiap tahun sebagai salah satu metode akuntabilitas keuangan pemerintah (Siswati et al., 2022).

Berdasarkan Nomor Laporan Pemeriksaan (LHP) 57/LHP/XPVIII.MDN/05/2022 telah dilakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017-2021. BPK memberikan opini disclaimer untuk tahun 2017 dan 2018, serta opini WDP untuk tahun 2019 hingga 2021, selama pemeriksaan. Pada tahun anggaran 2017 dan 2018, BPK mengeluarkan opini disclaimer kewajaran aset tetap tidak dapat dipercaya, dan volume jasa konstruksi tidak mencukupi, akibat kekurangan kas di bendahara pengeluaran, dan realisasi belanja dan jasa tidak dapat tidak dianggap wajar (www.bpk.go.id). Pada tahun anggaran 2019-2021 BPK memberikan opini WDP dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah pencatatan persediaan dan aset tetap tidak tertib, penatausahaan aset lain-lain belum tertib, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan pengeluaran meningkat sebagai akibat dari kebijakan yang tidak diterapkan atau tidak diikuti dengan benar.

Ketidakmampuan sumber daya manusia adalah akar penyebab dari masalah di atas yang memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi, penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi standar akuntansi pemerintahan, serta kurangnya pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah. BPK merekomendasikan kepala daerah agar menginstruksikan pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan lebih hati-hati dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, pemerintah telah berupaya menyusun laporan dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah. Namun, tidak semua PNS mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) banyak menemukan kejanggalan dalam pemeriksaannya atas laporan keuangan pemerintah, menimbulkan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), dan masih banyak fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data sesuai dengan peraturan. meningkatkan. Akuntabilitas publik juga telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai akibat dari hal tersebut.

Menurut penelitian (Putri & Bayu, 2022) dan (Rahman & Permatasari, 2021), Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Temuan studi Pilander et al., 2018) menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah diperbaiki dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Rahman dan Permatasari dan tahun 2017 oleh Pujanira dan Taman, sistem akuntansi keuangan daerah berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Dari beberapa penelitian diatas mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan memiliki berbagai hasil dan kesimpulan mengenai pengaruhnya. Subyek dan tahun penelitian membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. OPD Kabupaten Simalungun dipilih karena BPK mengeluarkan opini disclaimer tahun 2017-2018 dan opini WDP tahun 2019-2021 terkait hasil audit laporan keuangan daerah Kabupaten Simalungun.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Menurut Donaldson & Davis (1991), *stewardship theory* menunjukkan bahwa manajemen tidak pernah dimotivasi oleh tujuan individu melainkan berfokus pada tujuan utama, yaitu kepentingan organisasi. *Stewardship theory* juga menjelaskan situasi di mana manajer tidak termotivasi oleh tujuan mereka sendiri melainkan oleh hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Akibatnya, teori ini memiliki landasan psikologis dan sosiologis dan dikembangkan di lingkungan di mana para eksekutif bekerja sebagai pelayan untuk mencapai tujuan organisasi. Sanjaya dan lainnya, 2017). Menurut Saputri & Nursiam (2018), ketika dua pihak memiliki tujuan yang berbeda, *steward* akan lebih memilih untuk bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini karena *steward* lebih mementingkan pencapaian tujuan utama organisasi.

Pemerintah daerah dapat dipercaya untuk menampung aspirasi masyarakat, dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi dapat tercapai dan kesejahteraan rakyat dapat dimaksimalkan. Di sinilah letak relevansi teori *stewardship* dalam penelitian ini. Selain itu, laporan keuangan yang akurat harus dihasilkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kejadian transaksi yang sebenarnya.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi entitas pelapor (Nordiawan et al., 2007). Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pengguna yang akan membantu mereka membuat dan mengevaluasi keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya tentang kedudukan keuangan, pencapaian anggaran, arus kas, dan kinerja entitas pelapor.

Menurut Peraturan Pemerintah Amerika Serikat No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dianggap berkualitas tinggi jika relevan, dapat dipercaya, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Pemerintah daerah wajib menghasilkan informasi yang muncul dalam laporan keuangan sesuai dengan kriteria nilai informasi yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu dapat mengakibatkan kerugian daerah yang signifikan, kelemahan administrasi, dan waktu yang tidak efisien dan efektif jika tidak sesuai dengan undang-undang.

Menurut Kristanti (2019), suatu laporan keuangan dianggap berkualitas tinggi jika informasi yang disajikan di dalamnya dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pengguna saat mengambil keputusan, bebas dari kesalahan material, andal, dan tidak mengandung kesalahan ide-ide yang menyesatkan secara material.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas; Seseorang tidak akan dapat melakukan yang terbaik dari kemampuannya jika tidak dilandasi oleh kompetensi yang memadai. Kemampuan untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan dikenal sebagai kompetensi sumber daya manusia (SDM). Menurut Ihsanti (2014), sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang memahami akuntansi pemerintahan diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Sumber daya manusia menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusunnya sudah mengenal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Efendi, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjadi landasan prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dasar akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi di atas bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan penuh, dan penyajian wajar merupakan prinsip-prinsip tersebut. dalam pertanyaan.

Menurut Bastian (2010), standar akuntansi pemerintahan adalah persyaratan hukum yang dirancang untuk meningkatkan standar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Mahmudi (2011), prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah merupakan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah seperangkat langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan tangan atau dengan program komputer. Mulai dari proses pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data dan diakhiri dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi desentralisasi, yang membagi kekuasaan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam kerangka pemerintah daerah wajib melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang berhubungan dengan pekerjaan. Mencatat pengeluaran, aset, pendapatan, dan hal lain selain uang tunai adalah contoh aktivitas akuntansi. Berdasarkan dokumen sumber bendahara, pejabat yang berwenang melakukan prosedur ini.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kapasitas individu atau kelompok dalam suatu lembaga atau sistem untuk secara efektif dan efisien menjalankan fungsinya atau menjalankan wewenang untuk mencapai tujuannya dikenal sebagai kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi, seperti yang didefinisikan oleh Hevesi (2005), adalah kualitas seseorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan.

Kompetensi sumber daya manusia, menurut penelitian (Putri & Bayu, 2022), meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kapasitas untuk melakukan tugas adalah kompetensi; Seseorang tidak akan dapat melakukan yang terbaik dari kemampuannya jika tidak dilandasi oleh kompetensi yang memadai. Kapasitas merupakan salah satu komponen kompetensi sumber daya manusia. Ini mengacu pada kapasitas seseorang atau organisasi (kelembagaan) atau sistem untuk menjalankan fungsinya atau menjalankan wewenang untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Berikut hipotesis penelitian:

H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan pedoman

yang berlaku dan terstruktur sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi dan akurat, terutama yang keberadaannya sangat penting dan membutuhkan akuntansi. Menurut *stewardship theory*, Elemen-elemen ini harus dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang diperlukan untuk hasil output yang lebih baik agar berguna bagi organisasi dan pengguna data keuangan pemerintah.

Penelitian (Pilander et al., 2018) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh (Kusumah, 2012), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Menurut *stewardship theory*, pemerintah daerah harus dipercaya untuk bertindak demi kepentingan publik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selain itu, diperlukan sejumlah peraturan, termasuk Standar Akuntansi Pemerintahan, untuk memastikan bahwa sistem akuntansi daerah digunakan dengan benar. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal sangat mendukung kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut penelitian (Rahman & Permatasari, 2021), sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian langkah-langkah yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan program komputer. Dimulai dengan pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data dan diakhiri dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD. Permendagri 64 Tahun 2013). Sistem akuntansi keuangan daerah memungkinkan pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel, transparan, dan efisien. Berikut hipotesis penelitian:

H3: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdapat di Kabupaten Simalungun berjumlah 33 OPD. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 33 OPD di Kabupaten Simalungun. Setiap sampel masing-masing sebanyak 3 responden. Satu orang bendahara OPD, satu orang staf bagian keuangan, dan satu orang pegawai Kasubbag Keuangan semuanya berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden. dengan total sampel 99 orang. Dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling* untuk memilih sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian yang subjektif dan harus memenuhi kriteria sebagai sampel. Skala Likert digunakan untuk mengukur kuesioner dalam penelitian ini. Menggunakan SPSS 24, regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KLKD	99	17	40	33.54	4.406
KSDM	99	18	30	24.73	3.276
PSAP	99	24	120	89.22	19.876
SAKD	99	16	30	24.86	2.766
Valid (listwise)	N 99				

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer 2022

Berdasarkan tabel diatas diketahui jumlah ampel yang digunakan 99. Pada variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah memiliki rata-rata sebesar 33,54 dengan nilai minimum 17 dan nilai maksimum 40 dan standar deviasi 4,403. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata 24,73, standar deviasi 3,276, rentang 18 sampai 30, dan nilai maksimal 30. Nilai rata-rata variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 89,22, standar deviasi sebesar 19,876, rentang 24 sampai 120, dan nilai minimal 24. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai rata-rata 24,86, standar deviasi 2,766, rentang 16 sampai 30, dan nilai maksimal 30.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2
Uji Normalitas

		Unstandardi zed Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.83326808
	Most Extreme Absolute Differences	.048
	Positive	.041
	Negative	-.048
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual diatas, dapat dilihat bahwa nilai probability sebesar 0,200. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai tersebut, maka asumsi normalitas akan terpenuhi. Data residual berdistribusi normal karena nilai probabilitasnya lebih besar dari alpha..

Uji Multikolinearitas

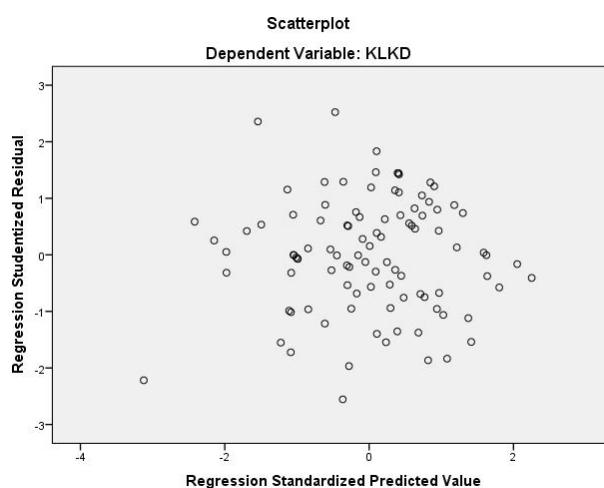
Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
KSDM	.855	1.170
PSAP	.999	1.001
SAKD	.854	1.171

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Data olahan yang digunakan dalam uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk semua variabel independen kurang dari 10,00 (sepuluh), sedangkan nilai toleransi untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi variabel Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah lebih besar atau sama dengan 0,1. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen ditunjukkan oleh hal ini. Karena tidak ada kasus multikolinearitas di antara variabel independen, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data dari penelitian ini tidak mengandung kejadian multikolinearitas. Akibatnya, dimungkinkan untuk mengolah data menggunakan regresi linier berganda.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1
Uji Heterokedastisitas

Karena data terdistribusi di atas dan di bawah sumbu 0 dan tidak membentuk pola, maka dari gambar tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena tidak ada contoh heteroskedastisitas dalam model regresi linier berganda, penyelidikan dapat dilanjutkan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.080	3.168		-.656	.513
KSDM	.343	.096	.255	3.571	.001
PSAP	.033	.015	.151	2.289	.024
SAKD	.972	.114	.610	8.545	.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel dapat dilihat persamaan regresi yang diperoleh sebagai berikut:

$$Y = -2.080 + 0.343 \text{ KSDM} + 0.033 \text{ PSAP} + 0.972 \text{ SAKD}$$

Nilai t hitung untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 3,571, dan nilai df nya adalah $99 - 3 = 96$ ($\text{sig} = 0,001 < 0,05$). Sehingga menghasilkan t tabel 1,660. Seperti terlihat pada hasil sebelumnya, Ha diterima dan H0 ditolak karena 3,571 lebih besar dari 1,660 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, menurut kajian OPD Kabupaten Simalungun.

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menghasilkan t tabel sebesar 1,660 dengan nilai t 2,289 dan nilai ($\text{sig} = 0,024 < 0,05$) sebesar 96. Seperti yang terlihat dari hasil sebelumnya, Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, atau 2,289 kali lebih besar dari 1,660, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Hasilnya, kajian OPD Kabupaten Simalungun dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan standar akuntansi pemerintahan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Dengan nilai t hitung sebesar 8,545, nilai ($\text{sig} = 0,000 < 0,05$), dan nilai df $99 - 3 = 96$, diperoleh t tabel sebesar 1,660 untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah. Seperti terlihat pada hasil sebelumnya, Ha diterima dan H0 ditolak karena 8,545 lebih besar dari 1,660 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Hasilnya, kajian OPD Kabupaten Simalungun dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5
Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.080	3.168		-.656	.513
KSDM	.343	.096	.255	3.571	.001
PSAP	.033	.015	.151	2.289	.024
SAKD	.972	.114	.610	8.545	.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Nilai t hitung untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 3,571, dan nilai df nya adalah $99 - 3 = 96$ ($\text{sig} = 0,001 < 0,05$). Sehingga menghasilkan t tabel 1,660. Seperti terlihat pada hasil sebelumnya, H_a diterima dan H_0 ditolak karena 3,571 lebih besar dari 1,660 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, menurut kajian OPD Kabupaten Simalungun.

Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menghasilkan t tabel sebesar 1,660 dengan nilai t 2,289 dan nilai ($\text{sig} = 0,024 < 0,05$) sebesar 96. Seperti yang terlihat dari hasil sebelumnya, Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, atau 2,289 kali lebih besar dari 1,660, maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasilnya, kajian OPD Kabupaten Simalungun dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan standar akuntansi pemerintahan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Dengan nilai t hitung sebesar 8,545, nilai ($\text{sig} = 0,000 < 0,05$), dan nilai df $99 - 3 = 96$, diperoleh t tabel sebesar 1,660 untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah. Seperti terlihat pada hasil sebelumnya, H_a diterima dan H_0 ditolak karena 8,545 lebih besar dari 1,660 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Hasilnya, kajian OPD Kabupaten Simalungun dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1115.940	3	371.980	44.920	.000 ^b
	Residual	786.686	95	8.281		
	Total	1902.626	98			

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diperoleh nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ atau $44,920 > 2,70$ dengan nilai signifikan sebesar ($\text{sig} = 0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan variabel bebas di OPD Kabupaten Simalungun yang ditemukan secara bersamaan atau simultan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Uji R-Square

Tabel 7
Uji R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.573	2.878

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2022

Nilai R-Square adalah 0,587, seperti terlihat pada tabel di atas. Kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan

daerah adalah variabel independen, seperti yang ditunjukkan memiliki pengaruh sebesar 58,7% terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Daerah, sedangkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian memiliki pengaruh dampak 41,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia semuanya berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dengan nilai thitung sebesar 3,571 dan nilai (sig = 0,001 0,05) sebesar $99 - 3 = 96$, nilai t-tabel untuk data Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah 1,660. Seperti terlihat pada hasil sebelumnya, H_a diterima dan H_0 ditolak karena 3,571 lebih besar dari 1,660 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, menurut kajian OPD Kabupaten Simalungun.

Asumsi peneliti mengenai kompetensi sumber daya manusia didukung oleh nilai rata-rata yang sangat tinggi untuk variabel kompetensi sumber daya Manusia yang menggambarkan keadaan atau keadaan responden menunjukkan bahwa Pegawai Administrasi Keuangan di OPD Kabupaten Simalungun sangat kompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Senada dengan itu, hasil nilai rata-rata Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada OPD Kabupaten Simalungun sangat baik.

Menurut Pujanira & Taman (2017), kompetensi sumber daya manusia sangat bertanggung jawab atas kualitas laporan keuangan karena laporan keuangan yang tepat waktu, relevan, dan dapat dibandingkan akan dihasilkan dengan sumber daya manusia yang kompeten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pujanira & Taman, 2017), (Andini, 2015) yang menemukan pengaruh antara kualitas sumberdaya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

T-tabel sebesar 1,660 diperoleh dari analisis data variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang menghasilkan nilai t-value sebesar 2,289 dan nilai (sig = 0,024 0,05) dan $df = 99 - 3 = 96$. As can dilihat dari hasil sebelumnya, Jika t hitung lebih besar dari t tabel atau 2,289 kali lebih besar dari 1,660, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasilnya, kajian OPD Kabupaten Simalungun dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan standar akuntansi pemerintahan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Hipotesis peneliti menunjukkan bahwa pedoman penyajian laporan keuangan disediakan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Unsur-unsur yang diatur oleh standar akuntansi pemerintahan harus dicantumkan dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut stewardship theory, Elemen-elemen ini harus dimasukkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yang diperlukan untuk hasil output yang lebih baik agar berguna bagi organisasi dan pengguna data keuangan pemerintah.

Dalam menyusun standar akuntansi pemerintahan untuk pelaksanaan proses akuntansi di lingkungan pemerintahan, khususnya prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, perlu dipahami dan dipatuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Ini. Pemakai laporan harus dapat memahami laporan keuangan yang disajikan.

Dasmaran & Yulaeli (2018) dan Nurhasanah & Sari (2018) menunjukkan dalam penelitian sebelumnya bahwa hipotesis pertama bahwa Keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Data variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dianalisis dan diperoleh nilai t-tabel sebesar 1,660, dengan nilai t sebesar 8,545 dan nilai ($\text{sig} = 0,000 < 0,05$) dan $\text{df} = 99 - 3 = 96$. Sebagaimana dapat dilihat dari hasil sebelumnya H_a diterima dan H_0 ditolak karena 8,545 lebih besar dari 1,660 atau t hitung lebih besar dari t tabel. Hasilnya, kajian OPD Kabupaten Simalungun dapat menarik kesimpulan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Keputusan didasarkan pada asumsi peneliti mengenai keakuratan laporan keuangan daerah. Menurut *stewardship theory*, pemerintah daerah harus dipercaya untuk bertindak secara tepat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus berkualitas tinggi. Untuk mendapatkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Sistem Akuntansi Keuangan Daerah harus diterapkan.

Laporan keuangan dirancang agar relevan, dapat diandalkan, sebagaimana disampaikan Marsmo, SKPD harus memiliki sistem akuntansi yang handal dan dapat dipercaya. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ini membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitasnya. Kajian lain yang dilakukan oleh Lambey et al., (2021) menemukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara terkena dampak yang signifikan dan positif dari pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” menjadi judul penelitian (Studi Pada OPD Kabupaten Simalungun)” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Di Kabupaten Simalungun kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat secara signifikan melalui kompetensi sumber daya manusia. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Simalungun meningkat secara signifikan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun meningkat secara signifikan dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak memperhitungkan variabel-variabel tersebut, padahal variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Saran

Rekomendasi berikut dibuat oleh penulis sehubungan dengan kesimpulan sebelumnya: Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menambahkan variabel, memperluas populasi, dan menggunakan berbagai metode. Untuk Kemajuan Ilmu Pengetahuan, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk kepentingan pemerintah, sebaiknya OPD Kabupaten Simalungun harus memperbaiki aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas laporan tersebut di OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, D. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1), 65–82.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. *Jakarta: Erlangga*.
- Dasmaran, V., & Yulaeli, T. (2018). *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pandeglang*.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Efendi, R. (2021). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Penelitian Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sulawesi Selatan). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Kristanti, F. T. (2019). Financial Distress Teori dan Perkembangannya Dalam Konteks Indonesia. *Inteligensia Media*.
- Kusumah, A. A. (2012). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Lambey, M. A., Tanor, L., & Bacillius, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6(2).
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Pres.
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). Akuntansi Pemerintah. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Nurhasanah, F., & Sari, K. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntanika*, 4(1), 1–17.
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 9(2).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 14–28.

- Putri, P. G. A. M. G., & Bayu, P. C. G. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 241–251.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22.
- Sanjaya, A., Rasuli, M., & Haryani, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Skpd Ka. Riau University*.
- Saputri, A. E., & Nursiam, M. H. (2018). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada BKD Kabupaten Boyolali)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siswati, A. S. A., Suhaji, S., & Ginanjar, R. G. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Transportasi (Studi Kasus Pada PT. Blue Bird, Tbk Tahun 2015-2020). *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(7), 419–428.